

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi dan misi, tujuan, sasaran yang realistis dan cara-cara mencapainya untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan akan dicapai. Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 baru ditetapkan pada tanggal 24 November 2016, dan hal ini sesuai juga dengan surat Sekretaris Daerah nomor: 060/0076/ORG/II/2019, tanggal 21 Januari 2019, perihal Penyusunan LKIP 2018 dan PK 2019, bahwa Penyusunan LKIP dimaksud menggunakan data berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan Renstra Tahun 2016-2021.

Adapun format penyusunan LKIP mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Khusus penggunaan Indikator Kinerja Utama, mengacu pada Penetapan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021.

A. Visi dan Misi

Pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemukada Bupati / Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode masa jabatan 2016 -2021, dan telah dilantik secara definitif pada tanggal 17 Pebruari 2016 di Palangka Raya. Dalam periode masa jabatan 2016 – 2020 telah memasuki RPJMD tahap V dan tahun 2018 memasuki tahun ke 3 (tiga) RPJMD tahap V. Pelaksanaan Pembangunan RPJMD sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2016 – 2021, maka untuk menjaga kesinambungan

penyelenggaraan Pemerintahan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan tema dan prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 – 2025 dan Prioritas Pemerintah Pusat.

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2016 – 2021 , Yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN, SEJAHTERA”

Dengan Motto : **(MANIS MANASAI)**

Yang diwujudkan melalui 4 butir Misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan serta pariwisata dan budaya.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan meningkatkan kinerja Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan dan meningkatkan ketahanan ideologi Berbangsa dan Bernegara.
3. Mewujudkan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
4. Mewujudkan pemahaman pendewasaan tentang sikap dan perilaku yang demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik dan berorganisasi pada masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan Etika, moral dan Ideologi Berbangsa dan Bernegara.

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu suatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
2. Meningkatnya ketahanan ideologi berbangsa dan bernegara
3. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat
4. Pendewasaan sikap dan perilaku yang tertib, demokrasi dan saling menghargai dalam berpolitik.

C. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur, maka ditetapkan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

❖ Sekretariat

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	
Indikator Kinerja	Target
Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	472 OB
Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	142 OK
Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi	200 OK
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100%
Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	4 OK
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100%
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	60 buku
Cakupan kegiatan yang diikuti	1 kali kegiatan
Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Publik	
Indikator Kinerja	Target
Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%
Jumlah surat yang dilayani per tahun	1000 surat
Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 bidang
Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	1200m ²
Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 bidang
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 jenis
Jumlah komponen yang disediakan	5 jenis
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	3 jenis
Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	800 OK

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Publik	
Indikator Kinerja	Target
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%
Jumlah peralatan yang dibeli	2 unit
Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1200m ²
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 unit
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	53 kali
Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur	100%
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan/dibeli	41 orang

Sasaran Strategis : Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Temuan	
Indikator Kinerja	Target
Menurunnya jumlah hasil temuan pemeriksaan dari Inspektorat	1 dokumen

❖ **Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa**

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara	
Indikator Kinerja	Target
Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama	0 %
Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB	70 peserta
Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan	330 orang/4 kali kegiatan

❖ **Bidang Kewaspadaan**

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat	
Indikator Kinerja	Target
Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	0 %
Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan	100 %
Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di kecamatan	3 kali kegiatan
Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan	2 kecamatan
Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	5 aksi daerah
Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan	3 peta daerah rawan konflik
Jumlah desa/kecamatan yang dipantau	17 kecamatan

❖ **Bidang Politik dan Kemasyarakatan**

Sasaran Strategis :	
Pendewasan sikap dan perilaku yang tertib, demokratis, dan saling menghargai dalam berpolitik	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah peserta penyuluhan	180 orang
Jumlah parpol yang terdaftar	12 parpol
Jumlah parpol dan orams/LSM yang didata dan dipantau	12 parpol / 58 ormas

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

- Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi
- Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang difasilitasi
- Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan formal
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
- Jumlah kegiatan promosi yang diikuti

2. Meningkatnya Pelayanan Publik

- Jumlah surat yang dilayani per tahun
- Jumlah bidang yang dilayani per tahun
- Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
- Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan
- Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah komponen yang disediakan
- Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan
- Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai
- Jumlah peralatan yang dibeli
- Jumlah gedung kantor yang dipelihara
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
- Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara
- Jumlah peralatan gedung yang dipelihara
- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan

3. Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Temuan

- Menurunnya jumlah hasil temuan pemeriksaan dari Inspektorat

4. Meningkatnya ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara

- Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama
- Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB
- Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan

5. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat

- Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat
 - Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan
 - Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di Kecamatan
 - Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan
 - Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan
 - Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan
 - Jumlah desa/kecamatan yang dipantau
6. Pendewasaan sikap dan perilaku yang tertib, demokratis dan saling menghargai dalam berpolitik :
- Jumlah peserta penyuluhan
 - Jumlah parpol yang terdaftar
 - Jumlah parpol dan ormas yang didata/dipantau

D. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi , kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya surat Edaran Menteri Negara PAN No.SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Dengan diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor .53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka surat Edaran Menteri Negara PAN No.SE/31/M.PAN/12 /2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja / perjanjian kinerja antara lain adalah : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja, Target Program/Kegiatan anggaran digambarkan sebagai berikut :

- **SEKRETARIAT**

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	
Indikator Kinerja	Target
Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	472 OB
Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	142 OK
Jumlah rapat koordinasi yang difasilitasi	200 OK
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi	100%
Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	4 OK
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	100%
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	60 buku
Cakupan kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan
Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	APBD 2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	703,795,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9,300,000
	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	489,695,000
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	204,800,000
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	18,000,000

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,100,000
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	8,100,000
4	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	39,080,000
	Pelaksanaan Sampit EXPO	39,080,000

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Pelayanan Publik	
Indikator Kinerja	Target
Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%
Jumlah surat yang dilayani per tahun	1000 surat
Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 bidang
Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	1200m2
Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 bidang
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 jenis
Jumlah komponen yang disediakan	5 jenis
Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	3 jenis
Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	800 OK

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	APBD 2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	697,663,898
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,300,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,660,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	312,126,625
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	149,225,303
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	53,286,650
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45,427,320

	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5,902,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	20,480,000
	Penyediaan makanan dan minuman	68,256,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	302,822,903
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	16,125,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	65,800,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	177,496,880
	Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7,551,000
	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	35,850,023
3	Program Peningkatan disiplin Aparatur	36,050,000
	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	36,050,000

Sasaran Strategis : Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Temuan	
Indikator Kinerja	Target
Menurunnya jumlah hasil temuan pemeriksaan dari Inspektorat	1 dokumen

- **BIDANG KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA**

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Ketahanan Ideologi Berbangsa dan Bernegara	
Indikator Kinerja	Target
Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang agama	0 %
Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rapat koordinasi Dewan Penasehat FKUB	70 peserta
Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan ,Ikrar Bersama Anak Bangsa, Forum Bela Negara, Pembentukan Forum Bela Negara di Kecamatan	330 orang/4 kali kegiatan

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	APBD 2018
1	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	875,419,650
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	348,990,150
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur	526,429,500

- **BIDANG KEWASPADAAN**

Sasaran Strategis :	
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat	
Indikator Kinerja	Target
Persentase penurunan jumlah konflik sosial masyarakat	0 %
Persentase FKDM yang terbentuk tingkat kecamatan	100 %
Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM, Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di kecamatan	3 kali kegiatan
Jumlah wilayah yang menjadi obyek pengawasan	2 kecamatan
Jumlah Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan	5 aksi daerah
Jumlah desa/kecamatan yang dipetakan	3 peta daerah rawan konflik
Jumlah desa/kecamatan yang dipantau	17 kecamatan

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	APBD 2018
1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	597,890,825
	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	351,012,000
	Pengawasan Orang Asing	90,000,000
	Pemetaan Daerah Rawan Konflik	50,000,000
	Pemantauan Konflik Sosial	50,000,000
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah	56,878,825

- **BIDANG POLITIK DAN KEMASYARAKATAN**

Sasaran Strategis :	
Pendewasan sikap dan perilaku yang tertib, demokratis, dan saling menghargai dalam berpolitik	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah peserta penyuluhan	180 orang
Jumlah parpol yang terdaftar	12 parpol
Jumlah parpol dan orams/LSM yang didata dan dipantau	12 parpol / 58 ormas

Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	APBD 2018
1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	641,513,324
	Penyuluhan kepada masyarakat	91,221,500
	Penyusunan data base partai politik	78,990,000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21,301,824
	Dewan Adat Dayak	450,000,000

Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 3.**